



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN DAN STRATEGI ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2016



Sekretariat Jenderal
2016



KEBIJAKAN DAN STRATEGI ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2016

Berdasarkan UU nomor 25/2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka pelaksanaan perencanaan dan penganggaran harus berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah. Untuk itu, program dan kegiatan pada Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016 seyogyanya sudah menerapkan reformasi perencanaan dan penganggaran serta mengacu pada RPJMN 2010-2014 maupun Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019.

Agar berbagai program dan kegiatan Kementerian Pertanian pada tahun 2016 dapat berlangsung terarah dan terimplementasikan dengan baik, maka masing-masing Eselon I lingkup Kementerian Pertanian merumuskan kebijakan umum dan strategi pembangunan pertanian tahun 2016 sesuai bidang tugasnya. Kebijakan dan strategi masing-masing Eselon I tersebut tentu saja merupakan penjabaran dari kebijakan strategi yang akan dilaksanakan Kementerian Pertanian tahun 2016. Berdasarkan kebijakan umum dan strategi yang dirumuskan, maka program dan kegiatan masing-masing Eselon I dapat diuraikan sebagai berikut :



DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Kebijakan Umum

Meningkatkan produksi tanaman pangan dalam rangka memperkuat kedaulatan pangan melalui kebijakan :

1. Pengembangan gerakan penerapan (adopsi) teknologi dengan memberikan fasilitas sesuai kebutuhan lapangan.
2. Penguatan basis-basis penangkaran benih dengan memantapkan hubungan penyediaan benih berdasarkan kelas benih dan tata kelembagaan perbenihan yang baik.
3. Penguatan gerakan pengendalian OPT dan DPI dengan dukungan sarana pengendalian yang kondusif.
4. Pengembangan penanganan pascapanen sesuai kebutuhan lapangan.
5. Kebijakan pendukung lainnya

Strategi

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah:

1. Peningkatan Areal Tanam (Luas Tanam/Luas Panen),
2. Peningkatan Produktivitas,
3. Penurunan Kehilangan Hasil Produksi, dan
4. Peningkatan Mutu Hasil Produksi.

Program dan Kegiatan Ditjen Tanaman Pangan 2016

Program:

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan”.



Kegiatan:

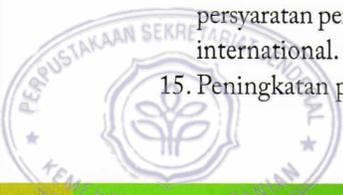
1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
4. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan
5. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
7. Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih
8. Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Kebijakan Umum

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (konsumsi, industri dan substitusi impor) dan meningkatkan ekspor melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP)/Standar Operasional Prosedur (SOP), penerapan pengendalian Hama Terpadu (PHT), Good Handling Practices (GHP), perbaikan kebun, penerapan teknologi maju, penggunaan bermutu varietas unggul.
2. Peningkatan Kualitas dan kuantitas produk hortikultura melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur serta sarana budidaya dan pascapanen hortikultura.
3. Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, penguatan kelembagaan penangkar, penataan Blok Fondasi (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT), meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.
4. Peningkatan peran swasta dalam membangun industri perbenihan.

5. Pemberdayaan petani/pelaku usaha hortikultura melalui bantuan sarana, sekolah lapang, magang, studi banding dan pendampingan.
6. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap teknologi maju antara lain kultur jaringan, rekayasa genetik, somatik embrio genetik, nano teknologi dan teknologi pascapanen serta pengolahan hasil.
7. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap pasar modern, pasar ekspor melalui pembenahan manajemen rantai pasokan, pembenahan rantai pendingin, kemitraan usaha.
8. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap permodalan bunga rendah seperti PKBL/CSR, Skim kredit bersubdi (KKPE), skim kredit penjaminan (KUR) serta bantuan sosial seperti PUAP, LM3, PMD.
9. Mendorong investasi hortikultura melalui fasilitasi investasi terpadu, promosi baik di dalam maupun di luar negeri dan dukungan iklim usaha yang kondusif melalui pengembangan dan penyempurnaan regulasi.
10. Pembangunan dan pengutuhan kawasan hortikultura yang direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dengan instansi terkait.
11. Promosi dan kampanye meningkatkan konsumsi buah dan sayur dalam rangka mendukung diversifikasi pangan serta mendorong upaya pencapaian standar konsumsi perkapita yang ditetapkan oleh FAO
12. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan secara terpadu melalui pengembangan SLPHT, pengembangan agen hayati, mitigasi dampak iklim.
13. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma –nuftah nasional melalui konservasi, domestikasi dan komersialisasi. Penanganan pascapanen yang berbasis kelompok tani, pelaku usaha dan industri untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
14. Berperan aktif dalam meningkatkan daya saing produk hortikultura di pasar internasional melalui pemenuhan persyaratan perdagangan dan peningkatan mutu produk dan mendorong perlindungan tarif dan non tariff perdagangan internasional.
15. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan



agribisnis hortikultura.

16. Pengembangan kelembagaan yang dapat membantu petani/pelaku usaha dalam mengakselerasi pertumbuhan agribisnis hortikultura.
17. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel, transparansi, disiplin anggaran, efisien dan efektif, pencapaian indikator kinerja secara optimal.

Strategi

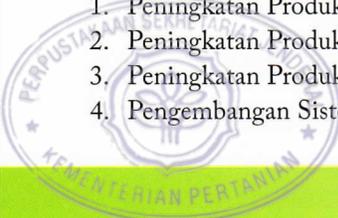
1. Pengembangan Kawasan/Penataan Kebun
2. Perbaikan Mutu Produk
3. Penguatan Sistem Perlindungan Tanaman
4. Penguatan Sistem Perbenihan
5. Penguatan Kelembagaan
6. Penanganan Pascapanen
7. Akselerasi Akses Pembiayaan dan Kemitraan
8. Pemasarakatan Produk Hortikultura

Program dan Kegiatan Ditjen Hortikultura 2016

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

Kegiatan

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan
2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan
3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan
4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura.



DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Kebijakan Umum

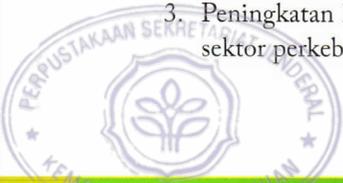
Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan.

Strategi Umum

1. Pengembangan komoditas perkebunan strategis;
2. Pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan unggulan nasional;
3. Pengembangan sumberdaya insani perkebunan (SDI);
4. Penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan;
5. Pengembangan dan penguatan sistem pembiayaan perkebunan;
6. Pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung usaha perkebunan;
7. Perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Peningkatan upaya adaptasi, mitigasi bencana, perubahan iklim dan perlindungan perkebunan;
9. Dukungan pengelolaan dan pelaksanaan program tematik pembangunan perkebunan;
10. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi sebagai dasar pelayanan prima.

Strategi Khusus / Rencana Aksi

1. Pemenuhan penyediaan bahan baku Tebu dalam rangka peningkatan produksi gula Nasional,
2. Peningkatan diversifikasi pangan berbasis komoditas perkebunan,
3. Peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan,



4. Pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan fondasi sistem pertanian bio-energy,
5. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan yang baik, dan
6. Peningkatan pendapatan keluarga pekebun.

Program dan Kegiatan Ditjen Perkebunan 2016

Peningkatan Produksi, dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kebijakan Umum

1. Peningkatan komoditas ekspor, penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi dengan pendekatan kawasan;
2. Peningkatan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian;
3. Penyediaan prasarana dan sarana dasar pertanian;
4. Pemberian perlindungan dan pemberdayaan petani dan;
5. Peningkatan tata kelola yang baik

Strategi

1. Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal
2. Penguatan kawasan dan kelembagaan peternakan
3. Penguatan infrastruktur dan pelayanan teknis
4. Pemberdayaan peternakan dan daya saing
5. Peningkatan jumlah dan kapasitas (kualitas) SDM peternakan dan kesehatan hewan



6. Penerapan teknologi dan sistem informasi peternakan dan kesehatan hewan
7. Penguatan regulasi peternakan dan kesehatan hewan
8. Mendorong insentif peternakan
9. Perbaikan tata niaga ternak dan produk ternak

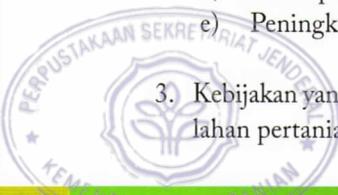
Program dan Kegiatan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 2016

”Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat”

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Arah Kebijakan

1. Kebijakan yang terkait dengan pengembangan infrastruktur pertanian aspek lahan adalah pengembangan jalan pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
2. Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, ditempuh melalui :
 - a) Penambahan Baku Lahan (PBL)
 - b) Pendekatan kawasan yang berskala ekonomi
 - c) Kesesuaian daya dukung dan agropedoklimat
 - d) Partisipasi dan pemberdayaan petani
 - e) Peningkatan efektivitas pembelajaran melalui pendampingan.
3. Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: terwujudnya upaya optimasi, konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lahan pertanian :



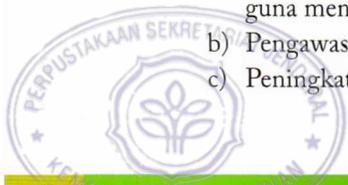
- a) Kebijakan optimasi lahan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat/ petani peternak pada lahan terlantar, dan lahan yang berpotensi untuk ditingkatkan IP-nya melalui:
 - Kebijakan pengembangan usahatani dan konservasi DAS hulu yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.
 - Kebijakan Reklamasi lahan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat/ petani pada lahan rawa, bekas tambang, dan bekas industri.
 - Kebijakan perbaikan kesuburan lahan sawah melalui pengembangan rumah kompos dan UPPO untuk pemberian/ penambahan bahan organik/ kompos.
 - Peningkatan efektifitas pembelajaran melalui pendampingan.
 - b) Kebijakan peningkatan kesuburan dan produktivitas lahan melalui pengembangan pertanian ramah lingkungan yang dikenal dengan System of Rice Intensification (SRI)
4. Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: tercapainya pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil, adalah :
- a) Diprioritaskan pada kawasan kekeringan dengan mendayagunakan baik air permukaan maupun air tanah.
 - b) Pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil secara berkelanjutan dengan cara partisipatif.
5. Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: tercapainya optimasi pemanfaatan air irigasi, adalah :
- a) Peningkatan fungsi prasarana irigasi,
 - b) Penerapan teknologi hemat air
 - c) Peningkatan partisipasi masyarakat.
 - d) Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air (P3A).



6. Kebijakan yang terkait dengan pengembangan konservasi air dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim, yaitu:
 - a) Pengembangan teknik pemanenan air dengan pembangunan embung;
 - b) Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur resapan;
 - c) Pengembangan model adaptasi perubahan iklim (PMAPI).

7. Kebijakan terkait dengan revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaan petani dalam rangka meningkatkan ketersediaan pembiayaan/kredit bagi petani, fokus pada :
 - a) Pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan;
 - b) Pembiayaan yang bersumber dari dana BUMN/ CSR;
 - c) Pembiayaan yang bersumber dari dana lembaga Keuangan Non Bank;
 - d) Pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan swasta dan masyarakat;
 - e) Pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat tani dan atau masyarakat yang peduli terhadap pertanian;
 - f) Pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/ Kota);
 - g) Pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan mikro dan lembaga adat yang berkembang di masyarakat; serta sumber pembiayaan lainnya.

8. Kebijakan terkait pupuk dan pestisida, adalah:
 - a) Penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk mendorong penerapan pemupukan secara berimbang guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
 - b) Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan.
 - c) Peningkatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida pertanian.



9. Kebijakan pengembangan alsintan, didalamnya memuat beberapa hal sebagai berikut :
- a) Kebijakan yang terkait dengan sasaran meningkatnya kepemilikan alsintan pada 33 propinsi sebesar 3-5 %, adalah : (a) sosialisasi pelaksanaan kegiatan kepemilikan alsintan, (b) koordinasi dengan Dinas Propinsi dan Kabupaten/ Kota guna pemantapan kegiatan kepemilikan alsintan, (c) kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan kepemilikan alsintan.
 - b) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya penumbuhan dan pengembangan UPJA Pemula, Berkembang dan Profesional, meningkat masing-masing 10%, 10% dan 15% per tahun, adalah : (a) sosialisasi Permentan No.25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan UPJA, (b) Pembentukan Tim UPJA, (c) kebijakan pemberdayaan dalam pengelolaan UPJA , (d) peningkatan peranan UPJA dalam pengembangan alsintan, (e) kebijakan peningkatan integrasi subsistem pengguna, penyedia alsintan, permodalan dan pembinaan dalam keberlanjutan kelembagaan UPJA.
 - c) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pengembangan bengkel alsintan di 33 propinsi, adalah : (a) sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi terkait, (b) peningkatan peranan produsen alsintan dalam pengembangan bengkel, (c) peningkatan keahlian pengelola bengkel alsintan.
 - d) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian yang berdayaguna dan berhasilguna di 33 provinsi meliputi : (a) sosialisasi pengawasan alsintan (b) meningkatkan jumlah dan kompetensi petugas pengawas alsintan dan (c) meningkatkan sarana pengawasan alsintan.
 - e) Kebijakan yang terkait dengan kualitas koordinasi dan sikronisasi dalam pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan di 33 Provinsi dalam rangka peningkatan forum komunikasi dan informasi pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan.



Strategi

Pengembangan dan pemanfaat sumberdaya lahan dan air secara lestari melalui :

1. Good Governance
2. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan Air Secara Lestari
3. Menetapkan Skala Prioritas Kawasan Pengembangan
4. Mendorong Pola Partisipatif
5. Mengalang Sinergi dan Meningkatkan Mutu Koordinasi
6. Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM Pertanian
7. Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang Feasible dan Bankable, adalah mendorong pemanfaatan peningkatan portfolio ketersediaan dana dari bank pelaksana KKP-E, KPEN-RP dan KUPS untuk membiayai usaha pertanian.
8. Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang Feasible dan tidak Bankable, adalah mengoptimalkan skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang resiko kreditnya. sudah ditangani oleh pemerintah melalui pola risk sharing.
9. Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang tidak Feasible dan tidak Bankable, adalah mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dari Gapoktan PUAP di pedesaan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil.
10. Strategi Penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi, dengan mendorong penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik melalui pemberian subsidi harga pupuk dan bantuan langsung pupuk, serta bantuan sarana pengolahan pupuk organik ditingkat petani.
11. Strategi dalam meningkatkan pengawasan pupuk dan Pestisida, yaitu dengan mendorong peran pemerintah daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida melalui peningkatan kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
12. Strategi pelaksanaan penyediaan alat dan mesin pertanian, yaitu melaksanakan manajemen penyediaan dan



pengawasan alat dan mesin pertanian yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah sesuai dengan peta kewenangannya.

13. Strategy pengembangan alat dan mesin pertanian secara selektif dan progresif, yaitu dengan melaksanakan pengembangan alsintan melalui optimalisasi penggunaan alsintan melalui optimalisasi penggunaan alsintan dan pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, efisien, serta kualitas semua sumber daya termasuk sumber daya tenaga kerja.
14. Strategy pengawasan alsintan, yaitu pemberdayaan petugas pengawas melalui peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penyediaan sarana pendukung.
15. Strategy penumbuhan dan pengembangan UPJA dan bengkel alsintan, yaitu pemberdayaan kelembagaan UPJA dan bengkel Alsintan melalui peningkatan kompetensi SDM, organisasi dan bisnis serta penerapan inovasi teknologi dibidang alat dan mesin pertanian.

Program dan Kegiatan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2016

Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah : Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja program adalah :

- 1) Tersedianya kebijakan, norma, standart, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana dan sarana pertanian
- 2) Terlaksananya bimbingan teknis dan pengawasan dibidang prasarana dan sarana pertanian
- 3) Tersedianya dan teroptimalisasinya pendayagunaan lahan dan air dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- 4) Berkembangnya sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana serta sistem perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha petani melalui asuransi pertanian.



- 5) Tersedianya dan Tersalurkannya pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
- 6) Berkembangnya sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pemanfaatan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.
- 7) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
- 8) Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
- 9) Terselenggaranya manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.

BADAN KETAHANAN PANGAN

Kebijakan Umum

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumber daya lokal;
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan;
3. Stabilisasi harga dan pasokan pangan;
4. Pengelolaan cadangan pangan;
5. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal dan
6. Pengawasan keamanan pangan segar.

Strategi

1. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian, dan perdesaan untuk:



- 1.1. Meningkatkan produksi pangan domestik;
- 1.2. Menyediakan lapangan kerja, dan
- 1.3. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
3. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;
4. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal;
5. Penanganan keamanan pangan segar.

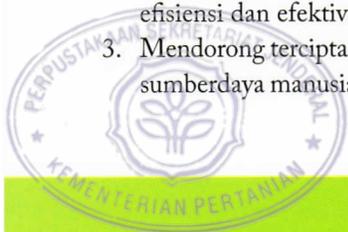
Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan 2016

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Kebijakan Umum

1. Mengembangkan kegiatan penelitian yang menunjang ke arah peningkatan produksi hasil pertanian, melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi, perluasan areal pertanian, terutama pada lahan sub optimal, serta mendukung upaya penyediaan sumber bahan pangan yang makin beragam.
2. Mendorong pengembangan dan penerapan konsep pertanian modern/advanced technology untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang terbatas jumlahnya.
3. Mendorong terciptanya suasana keilmuan dan kehidupan ilmiah yang kondusif sehingga memungkinkan optimalisasi sumberdaya manusia dalam pengembangan kapasitasnya untuk melakukan penelitian, perekayasa serta diseminasi



hasil penelitian.

4. Mendukung terciptanya kerjasama dan sinergi yang saling menguatkan, baik antara UK/UPT lingkup Balitbangtan, maupun antara Balitbangtan dengan berbagai lembaga terkait di dalam dan luar negeri.

Strategi

1. Memanfaatkan teknologi maju (advanced technology) seperti teknologi nano, bioteknologi, iradiasi, bioinformatika dan bioprosesing, yang adaptif untuk menghasilkan varietas/galur/klon unggul, teknologi dan inovasi budidaya, pasca panen, dan prototipe alsintan berbasis bioscience dan bioengineering.
2. Menyediakan model pengembangan inovasi pertanian, kelembagaan, dan rekomendasi kebijakan, serta produk inovasi pertanian berdaya saing seperti bibit unggul, prototipe alsintan, peta, data dan informasi; optimalisasi sumberdaya genetik dan lahan berkelanjutan termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; serta inovasi teknologi mendukung pengankaragaman pangan.
3. Meningkatkan penyediaan benih/bibit sumber melalui inovasi perbenihan dan memperkuat unit pengelola benih sumber (UPBS); mengembangkan sistem penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan, dan penyuluhan teknologi untuk mendukung pertanian bioindustri spesifik lokasi.
4. Meningkatkan kapasitas lembaga inovasi melalui sinergi dan kerjasama yang saling menguatkan; memperluas jejaring kerja melalui konsorsium riset; memanfaatkan Spektrum Diseminasi Multi Channel kepada seluruh stakeholders nasional melalui jejaring public-private-partnership (PPP) maupun internasional.
5. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kapabilitas SDM melalui perbaikan sistem rekrutmen, pendidikan jangka panjang, jangka pendek, dan sistem manajemen SDM yang efektif; membangun budaya baru penelitian yang menghargai daya cipta, berdaya saing tinggi dan sehat.



Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2016

Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN

Kebijakan Umum

1. Pemberdayaan Peran dan Fungsi Balai Penyuluh Pertanian sebagai Pusat Koordinasi program dan kegiatan di wilayah;
2. Peningkatan daya saing dan kinerja Balai Diklat;
3. Revitalisasi STPP dan SMK-PP serta Sertifikasi Profesi Pertanian;
4. Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen yang transparansi dan akuntabilitas.

Strategi

1. Pemberdayaan Peran dan Fungsi BP3K.
2. Meningkatkan Standardisasi mutu layanan kediklatan.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan
4. Perencanaan program dan kegiatan berbasis kinerja.



Program dan Kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian 2016
Peningkatan Efektifitas Penyuluhan dalam Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Pertanian.

BADAN KARANTINA PERTANIAN

Kebijakan Umum

1. Memperkuat sistem perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati berlandaskan analisa resiko;
2. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.

Strategi

1. Peningkatan sistem karantina hewan dan keamanan hayati hewani;
2. Peningkatan sistem karantina tumbuhan dan keamanan hayati;
3. Peningkatan kualitas pelayanan operasional karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan laboratorium uji standar dan uji terap teknik dan metode karantina pertanian;
5. Peningkatan kepatuhan, kerjasama dan pengembangan sistem informasi perkarantinaan;
6. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Badan Karantina Pertanian.

Program dan Kegiatan Badan Karantina Pertanian 2016

Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati



INSPEKTORAT JENDERAL

Kebijakan Umum

1. Peningkatan akuntabilitas pembangunan pertanian;
2. Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
3. Peningkatan kapabilitas Inspektorat Jenderal.

Strategi

1. Peningkatan efektifitas tata kelola keuangan, maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Implementasi audit kinerja berbasis risiko;
3. Peningkatan peran dan kerjasama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain, dalam pembuatan peraturan dan pedoman pengawasan intern.
4. Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan intern sesuai dengan praktik-praktik pengawasan intern terbaik (best practices);
5. Peningkatan internalisasi tekad anti korupsi, perluasan audit kinerja, pengawalan (asistensi dan konsultasi) dan pengawasan dengan tujuan tertentu (investigasi dan non investigasi), evaluasi, pengelolaan unit gratifikasi (UPG) serta optimalisasi Whistle's Blowing System (WBS);
6. Peningkatan kualitas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.

Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal 2016

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur



SEKRETARIAT JENDERAL

Kebijakan Umum

Membangun system manajemen pembangunan pertanian berkelanjutan yang sesuai dengan asas good governance yang meliputi tranparansi, akuntabilitas, partisipatif, demokratis serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.

Strategi

1. Mengembangkan dan perumusan kebijakan, program, system, model dann pedoman pembangunan pertanian
2. Menciptakan peluang kerjasama luar negeri yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam bidang teknis dan ekonomi pertanian,
3. Mengembangkan sumberdaya manusia melalui analisis beban kerja dan analisis jabatan untuk penetapan tugas dan fungsi serta struktur organisasi lingkup Kementerian Pertanian.
4. Mengembangkan basis data, dokumen produk hukum bidang pertanian dalam meningkatkan pelayanan public,
5. Mengembangkan system administrasi kepegawaian dan perlengkapan yang efektif dan efisien,
6. Menerapkan tehnologi informasi dengan desain networking guna penyebarluasan dan pemanfaatan informasi Pertanian berbasis internet.,
7. Menerapkan sistem perlindungan varietas tanaman dan hak kekayaan intelektual varietas tanaman.
8. Mengembangkan sistem perizinan, investasi pertanian dan pembiayaan pertanian.

Program dan Kegiatan Sekretariat Jenderal 2016

Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

- *Sumber data : Program dan Kegiatan Eselon I Kementerian Pertanian 2016)**
- *Digandakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.*

Edisi Agustus 2016

www.pertanian.go.id

**Biro Hubungan Masyarakat dan
Informasi Publik
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3 Gedung A
Ragunan, Jakarta 12550**



kementanRI



@kementerianpertanian



@kementan



Kementerian Pertanian